

Manajemen Isu Badan Gizi Nasional dalam Merespon Kasus Kecelakaan Mobil Makan Bergizi Gratis di SDN 01 Kalibaru

Agnia Mumtaza¹, Shafira Rixas Febriana², Hana Afni Reihana³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: agniamumtaza@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 10, 2026

Revised January 14, 2026

Accepted January 18, 2026

Keywords:

Issue Management, Public Affairs, Free Nutritious Meals (MBG), Online Media

ABSTRACT

The implementation of the Free Nutritious Meals (MBG) program in Indonesia faces complex operational dynamics, one of which is reflected in the logistics distribution incident at SDN 01 Kalibaru which sparked debate in online media. The incident became a sensitive public policy issue because it related to student safety and the credibility of the national program. The purpose of this study is to analyze issue management in the government's digital public affairs practices regarding online media narratives in the case. The research method used is a qualitative-descriptive approach with data collection techniques through literature studies and digital media observations. The results show that the government, through the relevant authorities, carried out issue management that focused on rapid response strategies, procedural clarification, and efforts to rebuild the MBG program's social legitimacy in the public eye to prevent a broader reputation crisis.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received January 10, 2026

Revised January 14, 2026

Accepted January 18, 2026

Kata Kunci:

Manajemen Isu, Public Affairs, Makan Bergizi Gratis (MBG), Media Online

ABSTRACT

Implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia menghadapi dinamika operasional yang kompleks, salah satunya tercermin dalam insiden distribusi logistik di SDN 01 Kalibaru yang memicu perdebatan di media online. Insiden tersebut menjadi isu kebijakan publik yang sensitif karena berkaitan dengan keselamatan siswa dan kredibilitas program nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen isu dalam praktik *digital public affairs* pemerintah terhadap narasi media online dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan observasi media digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melalui otoritas terkait melakukan manajemen isu yang berfokus pada strategi respons cepat, klarifikasi prosedural, serta upaya membangun kembali legitimasi sosial program MBG di mata publik guna mencegah krisis reputasi yang lebih luas.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Agnia Mumtaza

Universitas Muhammadiyah Jakarta

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi kebijakan strategis nasional dan mendapat pengawasan ketat dari masyarakat karena hubungannya langsung dengan pendidikan dan kesehatan. Tujuan MBG, yang diluncurkan pada tahun 2023, adalah untuk mendukung pendidikan nasional secara keseluruhan dan meningkatkan gizi anak sekolah dasar (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, RI, 2023). Namun, sebagai program baru, MBG menghadapi tantangan untuk menyelaraskan kegiatan lapangan dengan standar keselamatan yang diharapkan masyarakat. Ketidakpastian atau masalah teknis dalam distribusi sering kali menimbulkan cerita yang tidak menyenangkan yang meragukan kesiapan pemerintah. Setiap tahap distribusi terutama di infrastruktur sekolah yang padat memerlukan perhatian publik, yang menempatkan pemerintah dalam bahaya.

Kebijakan strategis nasional yang dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena terkait langsung dengan kesehatan anak dan investasi sumber daya manusia masa depan, MBG, program prioritas pemerintah, mendapatkan pengawasan yang sangat ketat dari masyarakat. Ditunjukkan oleh keterlibatan langsung pemimpin tertinggi negara, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan simbolis ke rumah sakit untuk menjenguk korban, tindakan penting untuk menurunkan tingkat kemarahan publik dan menunjukkan tanggung jawab penuh pemerintah terhadap konsekuensi dari kegagalan program tersebut.

Salah satu contoh nyata terjadi di SDN 01 Kalibaru, Banyuwangi, di mana truk pengantar MBG mengalami masalah yang menyebabkan distribusi tertunda dan gangguan ketertiban di sekolah. Dorongan media online, protes orang tua siswa, dan banyak diskusi di platform sosial membuat masalah ini dengan cepat berkembang menjadi masalah nasional (Kompas.com, 2023). Keadaan ini menunjukkan bagaimana masalah teknis kecil dapat merusak reputasi jika tidak ditangani dengan cara yang tepat. Ini akan membantu masyarakat mengawasi program pemerintah yang bagus. Distribusi di lingkungan sekolah yang ramai dalam konteks ini menambah kompleksitas karena melibatkan interaksi langsung dengan siswa, guru, dan komunitas lokal.

Untuk menjaga stabilitas dukungan meskipun pendapat masyarakat berubah-ubah, peran Public Affairs menjadi sangat penting untuk menghubungkan kepentingan pengelola program dengan pandangan publik (Grunig & Hunt, 1984). Manajemen isu digital tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif. Ini mencakup melacak, mengidentifikasi, dan menanggapi diskusi media sebelum berkembang menjadi krisis kepercayaan (Heath, 2006). Jika masalah operasional seperti di Kalibaru tidak ditangani dengan baik, kepercayaan terhadap program nasional akan menurun. Oleh karena itu, sangat penting untuk menilai strategi komunikasi pemerintah untuk menangani cerita online terkait MBG. Pemerintah dapat mempertahankan dukungan publik yang konsisten dengan menemukan pola komunikasi yang efektif, terutama di era digital, di mana informasi tersebar cepat (Coombs, 2015).

Dalam era informasi digital yang sangat reaktif, insiden kecelakaan di SDN 01 Kalibaru tidak hanya berhenti sebagai kejadian lokal, namun dengan sangat cepat bertransformasi

menjadi isu nasional melalui mekanisme viralitas di media sosial. Monitoring media menunjukkan bahwa video detik-detik kejadian yang terekam kamera pengawas dan ponsel warga tersebar luas di platform seperti Instagram, X, dan WhatsApp. Akun-akun informasi regional seperti @sekitaran_jakut menjadi salah satu pionir yang menyebarkan visualisasi kepanikan di lapangan sekolah, yang kemudian memicu gelombang empati sekaligus kritik tajam dari warganet terhadap aspek keamanan operasional Program MBG.

Narasi yang berkembang di jagat maya cenderung bersifat emosional dan menuntut pertanggungjawaban segera. Masyarakat mempertanyakan bagaimana sebuah program yang bertujuan mulia untuk memberikan gizi justru melibatkan pengemudi yang tidak memenuhi standar kelayakan fisik, serta mengapa akses kendaraan operasional bisa begitu mudah menerobos area berkumpulnya siswa. Viralnya video yang menunjukkan siswa tergeletak dan beberapa di antaranya terjepit di bawah kolong mobil menciptakan tekanan opini publik yang sangat besar bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera memberikan klarifikasi dan langkah nyata.

Salah satu fenomena menonjol dalam krisis informasi ini adalah penyebaran berita palsu atau hoaks yang menyebutkan adanya korban jiwa di kalangan siswa. Spekulasi mengenai kematian dua orang murid sempat menyebar luas dan memperkeruh suasana, yang jika tidak segera ditangani dapat merusak legitimasi Program MBG secara permanen. Menanggapi hal tersebut, BGN melalui pimpinannya serta Polda Metro Jaya secara proaktif melakukan kontra-narasi dengan menegaskan bahwa meskipun terdapat korban luka berat, tidak ada satu pun korban yang meninggal dunia dalam insiden tersebut. Klarifikasi ini menjadi langkah krusial dalam manajemen isu untuk mencegah terjadinya kepanikan massal dan menjaga kepercayaan publik terhadap integritas data pemerintah.

Media massa nasional pun turut memberikan atensi luar biasa terhadap kasus ini. Pemberitaan di berbagai portal berita seperti *Tempo*, *Liputan6*, *Antara*, dan *Kompas* terus memantau perkembangan kondisi korban dan proses hukum terhadap sopir. Sorotan media tidak hanya terbatas pada kronologi, tetapi juga mulai menyentuh aspek evaluatif terhadap sistem distribusi MBG secara keseluruhan. Dukungan politik dan perhatian dari tokoh-tokoh penting, seperti kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta Presiden Prabowo Subianto ke rumah sakit tempat korban dirawat, menjadi momen simbolis yang sangat berpengaruh dalam menurunkan tensi kemarahan publik dan menunjukkan bahwa pemerintah hadir secara penuh dalam menanggung dampak dari kegagalan operasional tersebut.

Dinamika media monitoring ini menggarisbawahi bahwa manajemen isu di era digital memerlukan kecepatan respons dan akurasi informasi yang sangat tinggi. Setiap jeda waktu komunikasi yang diambil oleh BGN tanpa memberikan kepastian akan diisi oleh spekulasi liar dari masyarakat. Oleh karena itu, pengaitan antara data monitoring media dengan strategi pemulihan citra menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa narasi yang dibangun pemerintah mampu menyeimbangkan antara fakta hukum, empati kemanusiaan, dan komitmen perbaikan sistemik ke depan.

Untuk memahami secara mendalam bagaimana Badan Gizi Nasional mengelola krisis pascainsiden SDN 01 Kalibaru, penelitian ini menggunakan kerangka Teori *Image Repair* (Pemulihan Citra) yang dikembangkan oleh William L. Benoit. Teori ini beranjak dari premis bahwa reputasi atau citra positif adalah aset paling berharga bagi individu maupun organisasi,

dan komunikasi merupakan alat utama untuk memperbaiki citra tersebut ketika terjadi tindakan yang dianggap menyinggung atau merugikan kepentingan publik. Benoit mengidentifikasi bahwa krisis citra muncul ketika sebuah entitas dianggap bertanggung jawab atas suatu tindakan yang dinilai buruk oleh khalayak sasarnya.

Dalam konteks kasus BGN, tindakan ofensif yang terjadi adalah kecelakaan mobil distribusi MBG yang melukai siswa di lingkungan sekolah, sebuah tempat yang seharusnya sangat aman. Tanggung jawab BGN dalam hal ini bersifat institusional karena kendaraan tersebut merupakan bagian dari ekosistem operasional program prioritas pemerintah. Benoit menawarkan lima kategori strategi utama yang dapat diimplementasikan untuk memulihkan citra yang rusak:

Denial (Penyangkalan): Strategi ini mencakup upaya untuk menolak tuduhan bahwa organisasi melakukan tindakan tersebut atau menolak bahwa tindakan itu sendiri pernah terjadi. Dalam kasus BGN, strategi *denial* digunakan secara spesifik dan terbatas untuk menyangkal informasi palsu (*hoaks*) mengenai kematian siswa demi menjaga akurasi fakta di mata publik.

Evasion of Responsibility (Penghindaran Tanggung Jawab): Strategi ini bertujuan untuk mengurangi persepsi tanggung jawab dengan memberikan dalih tertentu, seperti adanya provokasi, kecelakaan tak terduga (*accidental*), atau kurangnya informasi/kendali. Penjelasan BGN mengenai profil sopir pengganti yang kelelahan dan kesalahan teknis injak pedal dapat dikategorikan sebagai bentuk *evasion of responsibility* melalui sub-strategi *accident*. Hal ini bertujuan untuk mengomunikasikan bahwa insiden tersebut bukanlah kegagalan kebijakan gizi itu sendiri, melainkan kegagalan pada level eksekusi operasional individu di lapangan.

Reducing Offensiveness (Mengurangi Sifat Ofensif): Strategi ini mencoba untuk membuat dampak dari tindakan ofensif terlihat kurang buruk. Hal ini dapat dilakukan melalui *bolstering* (menekankan aspek positif organisasi), *compensation* (memberikan ganti rugi), hingga *minimization* (menyatakan dampak tidak seberat yang dibayangkan). BGN menerapkan ini secara intensif melalui janji penanggungan biaya rumah sakit secara penuh di kelas satu serta pemberian santunan bagi keluarga korban.

Corrective Action (Tindakan Perbaikan): Ini merupakan strategi yang sangat krusial dalam konteks kebijakan publik, di mana organisasi berjanji untuk memperbaiki situasi dan memastikan peristiwa serupa tidak akan terulang kembali. BGN secara eksplisit mengumumkan evaluasi menyeluruh terhadap SOP mitra distribusi (SPPG), peninjauan kelayakan kendaraan, dan pelatihan ulang pengemudi sebagai bentuk tanggung jawab sistemik.

Mortification (Permohonan Maaf/Penyesalan): Strategi yang melibatkan pengakuan bersalah secara terbuka dan permohonan maaf yang tulus kepada korban dan publik. Kehadiran pimpinan BGN serta Presiden Prabowo untuk menjenguk langsung para korban di rumah sakit merupakan bentuk nyata dari strategi *mortification* yang bertujuan untuk menunjukkan empati mendalam dari pemegang kekuasaan.

Penggunaan teori Benoit dalam penelitian ini memungkinkan analisis yang sistematis mengenai efektivitas setiap pesan komunikasi yang dikeluarkan oleh BGN. Keberhasilan pemulihan citra dalam birokrasi pemerintah Indonesia sering kali sangat bergantung pada seberapa cepat strategi *corrective action* diimplementasikan secara nyata, bukan sekadar janji lisan. Dalam kasus SDN 01 Kalibaru, konvergensi antara strategi *mortification* dan *corrective action* menjadi kunci utama dalam meredam eskalasi konflik di ruang publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mempelajari secara menyeluruh bagaimana praktik publik affairs digital pemerintah menangani kasus kecelakaan distribusi MBG di SDN 01 Kalibaru melalui media online. Studi ini secara khusus menyelidiki seberapa efektif metode komunikasi yang digunakan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencegah krisis kepercayaan dan memulihkan citra program di mata publik. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menjelaskan bagaimana pihak pemerintah memahami serta menanggapi krisis komunikasi di ruang digital sesuai konteks (Zuama et al. , 2021). Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang secara sistematis diambil dari artikel berita daring, dokumen resmi pemerintah, dan postingan di media sosial yang relevan. Untuk analisis data, digunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994), yang mencakup pengurangan data (memisahkan narasi media dan tanggapan pemerintah), penyajian data dengan narasi tematik, dan penarikan kesimpulan untuk menilai efektivitas strategi komunikasi yang digunakan.

Studi sebelumnya banyak membahas strategi komunikasi pemerintah dalam menangani krisis. Zuama et al. (2021) menekankan bahwa kemampuan pemerintah untuk merespons krisis di dunia digital sangat penting untuk pemahaman mereka tentang krisis tersebut. Selain itu, seperti yang dinyatakan oleh Kustiawan et al. (2024), manajemen masalah yang efektif membutuhkan kemampuan organisasi untuk mengantisipasi masalah dan tren yang dapat mengganggu hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan. Dengan memfokuskan pada cara program strategis nasional yang baru diluncurkan mengintegrasikan elemen teknis operasional dan manajemen reputasi digital, penelitian ini mengisi celah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Narasi Media Online atas Insiden SDN 01 Kalibaru

Isu yang berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul karena kesulitan dalam mendistribusikan bantuan secara luas ke berbagai tempat yang memiliki infrastruktur yang terbatas dan akses yang sempit. Di SDN 01 Kalibaru, media daring secara aktif mengembangkan narasi yang berfokus pada kekhawatiran akan keselamatan publik. Informasi yang disampaikan kini tidak lagi membahas keuntungan gizi dari program itu, tetapi beralih pada bahaya dari keberadaan kendaraan pengantar MBG di sekitar sekolah yang ramai. Media memanfaatkan kecepatan dalam menyampaikan berita untuk memperkuat sisi kerentanan para siswa, sehingga menciptakan kesan mendesak yang mendorong pemerintah untuk segera meninjau kembali protokol keselamatan dalam proses distribusi.

Beberapa situs berita nasional, termasuk berita dari BBC News Indonesia (2024), menyoroti fakta bahwa penyedia jasa menggunakan pekerja tanpa prosedur resmi atau "pengemudi cadangan". Cerita ini mengubah pandangan masyarakat dari "kecelakaan teknis" menjadi "kelalaian dalam manajemen". Penggunaan frasa seperti "truk mematikan" atau "trauma pada siswa" dalam judul berita meningkatkan emosi pembaca, sehingga pemerintah tidak hanya diharapkan memberikan solusi teknis, tetapi juga respons yang penuh pengertian. Hal ini menyebabkan para pengelola program kesulitan untuk mempertahankan kepercayaan publik, karena masalah keselamatan fisik siswa sering dianggap lebih mendesak dibandingkan dengan keuntungan jangka panjang dari MBG.

Fakta-fakta baru yang diungkap dalam laporan Kompas.com (2025) menambah kedalaman pemahaman terhadap kejadian ini, di mana kendaraan MBG yang terlibat dalam kecelakaan dengan murid SDN 01 Kalibaru dikemudikan oleh pengemudi yang mengalami kurang tidur dan salah arah. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pengemudi itu telah bekerja lembur selama beberapa hari sebelumnya, menyebabkan kelelahan yang parah dan kesalahan dalam navigasi saat mendekati lokasi sekolah yang ramai. Ini tidak hanya memperkuat cerita media mengenai bahaya keselamatan, tetapi juga menyoroti kekurangan dalam pengaturan jam kerja dan pengawasan kesehatan pengemudi oleh perusahaan logistik. Informasi ini menjadi viral di media sosial, di mana pengguna membagikan video serta komentar yang menyerukan audit menyeluruh atas standar operasional MBG, sehingga meningkatkan tekanan kepada pemerintah untuk memberikan penjelasan yang jelas dan melakukan tindakan perbaikan dengan cepat.

Hasil studi dibandingkan dengan penelitian sebelumnya oleh Zebua et al. (2021) menunjukkan bahwa pola manajemen krisis yang serupa ditemukan baik di organisasi publik maupun swasta. Dalam kasus kecelakaan Grabwheels, manajemen krisis Grab Indonesia dibagi menjadi tiga fase utama: sebelum krisis, respons krisis, dan setelah krisis. Ini sejalan dengan temuan yang ditemukan dalam kasus SDN 01 Kalibaru, di mana Badan Gizi Nasional (BGN) juga menunjukkan reaksi cepat setelah peristiwa. Untuk meredam perasaan negatif publik, Grab Indonesia segera mengeluarkan pernyataan resmi melalui CEO nya untuk menyampaikan duka cita dan tanggung jawab selama fase respons bencana. Serupa dengan BGN, keberhasilan respons pada tahap ini sangat bergantung pada kehadiran para pemimpin, seperti kunjungan presiden dan wakil presiden, yang secara efektif menghentikan penyebaran masalah di media sosial.

PEMBAHASAN

Dalam situasi ini, pemerintah berada di bawah tekanan besar untuk menangani masalah dengan tegas, dengan harapan membatasi kasus di SDN 01 Kalibaru agar tidak dilihat sebagai gambaran kegagalan sistem nasional MBG. Melalui pendekatan manajemen isu di platform digital, pemerintah berusaha mengubah kritik menjadi cerita perbaikan. Tindakan ini dilakukan dengan menunjukkan keterbukaan dalam menangani para korban, serta memberikan komitmen untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyedia logistik. Tujuan utamanya adalah agar MBG tetap memiliki "izin sosial" untuk berlanjut, tanpa harus dibayangi stigma negatif terkait keamanan logistik di masa mendatang.

Strategi Manajemen Isu Public Affairs Pemerintah

Otoritas yang berwenang telah memberikan dukungan besar untuk segera melaksanakan regulasi keselamatan. Mereka melakukan penjelasan melalui saluran digital resmi, seperti situs atau platform media sosial pemerintah. Dalam pernyataan mereka, pihak berwenang mengungkapkan dukungan total dan menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dan bersedia mencari jalan keluar. Pendekatan ini membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena mencerminkan bahwa otoritas tidak menghindari dari masalah, melainkan berusaha menanganinya secara langsung.

Salah satu strategi penting yang diterapkan adalah komunikasi yang jelas dan terbuka. Pihak berwenang menyampaikan urutan peristiwa dengan transparan, agar publik bisa memahami situasi yang sebenarnya. Langkah ini diambil untuk meminimalkan dugaan yang kerap muncul di platform media sosial. Dengan cara ini, data yang benar dapat menyebar lebih luas, sehingga masyarakat tidak mudah terjebak dalam informasi yang tidak benar. Menurut Coombs (2007), komunikasi krisis yang terbuka sangat penting untuk membangun kepercayaan dan menghindari kerusakan reputasi yang lebih lanjut.

Strategi lain yang digunakan adalah melibatkan stakeholder, yaitu semua pihak terkait seperti sekolah dan komite orang tua. Pihak berwenang mengadakan diskusi untuk memastikan bahwa proses distribusi program MBG dievaluasi dengan cara yang tepat. Ini berarti mereka mengambil waktu untuk mendengarkan pendapat dari orang tua dan guru, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara bersama-sama. Selain itu, pihak berwenang juga menggunakan kontra narasi dengan membagikan konten digital yang menampilkan aspek positif dari program, seperti keuntungan yang diperoleh di tempat lain. Pendekatan ini dikenal sebagai *bolstering*, yang bertujuan untuk menyeimbangkan pandangan masyarakat agar mereka dapat melihat manfaat program, bukan hanya kendala yang ada (Coombs dan Holladay, 2002). Metode ini juga sejalan dengan teori stakeholder yang dipaparkan oleh Freeman (1984), yang menegaskan pentingnya kerja sama dalam menghadapi risiko.

Tantangan dan Strategi Advokasi

Tantangan utama dalam menangani isu pada kasus ini adalah perbedaan antara prosedur operasional standar yang dibuat oleh pusat dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak ketiga atau penyedia layanan logistik. Temuan di lapangan yang menunjukkan adanya "sopir cadangan" yang tidak memiliki sertifikasi resmi, seperti yang diinformasikan oleh BBC News Indonesia (2024), mengungkapkan adanya kekurangan dalam pengawasan rantai distribusi logistik dalam program MBG. Kondisi ini berisiko merusak citra pemerintah, karena kegagalan dari pihak vendor sering kali dianggap sebagai kegagalan pemerintah dalam melindungi keselamatan warga. Selain itu, cepatnya penyebaran kabar negatif di media sosial yang sering kali melebihi waktu respons pemerintah memperburuk situasi ini, menciptakan kekurangan informasi yang diisi dengan dugaan masyarakat tentang profesionalisme pengelola program nasional ini.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pendekatan advokasi yang digunakan pemerintah mencakup komunikasi yang efektif serta langkah-langkah hukum yang terstruktur, seperti mendorong penyelidikan yang jujur dan penerapan hukuman bagi mitra logistik. Seperti yang dinyatakan oleh Kustiawan et al. (2024), pengelolaan isu yang berhasil memerlukan organisasi untuk memperkirakan tren dan masalah yang berpotensi merusak hubungan jangka panjang dengan pemangku kepentingan. Dalam situasi ini, pemerintah mengambil langkah perbaikan dengan menanggung biaya perawatan bagi korban di rumah sakit dengan layanan terbaik sebagai bentuk advokasi sosial. Inisiatif ini bertujuan untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap insiden tersebut, dari yang dianggap sebagai "kelalaian sistemik" menjadi "momentum untuk meningkatkan standar keselamatan", sehingga dapat meredakan ketegangan antara sekolah, orang tua siswa, dan pengelola program.

Selain itu, tantangan jangka panjang yang harus dihadapi oleh pemerintah terkait masalah publik digital adalah cara untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG saat adanya keraguan dari media online. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun dialog yang lebih aktif dan kolaboratif dengan mitra logistik melalui penandatanganan kesepakatan integritas dan pelaksanaan audit transparansi secara berkala mengenai kelayakan kendaraan. Pendekatan advokasi ini sangat penting agar fungsi pengelolaan urusan publik tidak hanya bersifat reaktif dalam menjawab krisis, tetapi beralih ke pencegahan dengan menekankan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan mengubah krisis yang terjadi di SDN 01 Kalibaru menjadi standar baru dalam operasional logistik, pemerintah sebenarnya sedang melakukan manajemen isu untuk memperkuat posisi program strategis nasional di mata publik dan media (Zuama et al., 2021).

Penelitian ini mendukung pendapat Zebua et al. (2021) bahwa kepercayaan adalah komponen paling penting bagi sebuah organisasi untuk mempertahankan reputasinya pasca-krisis. Hasil kasus BGN menunjukkan bahwa pendekatan *Corrective Action* (tindakan perbaikan) menjadi kunci, seperti yang ditunjukkan oleh upaya Grab Indonesia untuk meningkatkan layanan dan memberikan pendidikan komprehensif kepada pemangku kepentingan setelah kecelakaan fatal. Perbedaan terletak pada kepentingan publik sementara krisis pada Grab mempengaruhi reputasi perusahaan, kegagalan operasional MBG di SDN 01 Kalibaru dapat merusak legitimasi program strategis pemerintah nasional. Akibatnya, menerapkan strategi pengurangan kematian dan tindakan koreksi secara bersamaan seperti janji evaluasi prosedur operasi standar (SOP) dan penanggungan biaya rumah sakit bukan sekadar upaya pemulihan citra teknis itu adalah kewajiban moral pemerintah untuk terus mendukung kebijakan kesehatan gizi jangka panjang negara.

KESIMPULAN

Manajemen isu dalam kegiatan publik pemerintah terkait kasus Truk MBG di SDN 01 Kalibaru menunjukkan betapa pentingnya komunikasi strategis untuk menjaga kepercayaan terhadap program nasional. Pemerintah berusaha mengadopsi pendekatan yang fleksibel dengan dukungan kebijakan serta pengelolaan opini publik guna mengurangi risiko konflik sosial. Pendekatan yang menekankan pada kolaborasi dan komunikasi yang transparan menjadi hal utama dalam menghadapi tekanan publik di zaman digital ini. Keberhasilan dalam menangani isu ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menjalin hubungan yang baik dengan media serta mendorong terciptanya standar distribusi yang lebih aman dan profesional dalam konteks program Makan Bergizi Gratis. Di samping itu, informasi terbaru dari berita, seperti masalah kelelahan pengemudi dan kesalahan dalam navigasi, menyoroti pentingnya penguatan pengawasan terhadap faktor manusia dalam operasional logistik, sehingga manajemen isu menjadi tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif untuk mencegah terulangnya insiden yang serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

BBC News Indonesia. (2025, Desember 13). Mobil MBG tabrak siswa SD, pengemudi 'cadangan' tanpa prosedur resmi. BBC.com.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c98n6r2dj1qo>

- Benoit, W. L. (1995). *Accounts, Excuses, and Apologies: A Theory of Image Restoration Strategies*. State University of New York Press.
- Benoit, W. L. (1997). Image repair discourse and crisis communication. *Public Relations Review*, 23(2), 177-186. +2.
- Coombs, W. T. (2015). *Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding* (4th ed.). Sage Publications.
- Coombs, W. T. (2007). *Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding*. Sage Publications.
- Coombs, W. T., & Holladay, S. J. (2002). Helping crisis managers protect reputational assets: Initial tests of the situational crisis communication theory. *Management Communication Quarterly*, 16(2), 165-186.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
- Ilham, I. (2024) ent. *Strategi Komunikasi Memperkuat Hubungan Interpersonal dan Public Relation*. Mutiara Intelektual Indonesia.
- Grunig, J. E., & Hunt, T. (1984). *Managing Public Relations*. Holt, Rinehart and Winston.
- Health, R. L. (2006). *Strategic Issues Management: Organizations and Public Policy Challenges*. Sage Publications.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI. (2023). *Panduan Program Makan Bergizi Gratis*. Diakses dari <https://www.kemendikbud.go.id>.
- Kompas.com. (2025, Desember 13). Fakta-fakta baru mobil MBG tabrak siswa SD: Sopir kurang tidur dan salah. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2025/12/13/07133681/fakta-fakta-baru-mobil-mbg-tabrak-siswa-sd-sopir-kurang-tidur-dan-salah>
- Kustiawan, W., et al. (2024). Public Relations dan Manajemen Isu. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage Publications.
- Zebua, W. D. A., Utari, S. A., & Djuwardie, D. T. (2021). Komunikasi Krisis Grab Indonesia pada Kasus Kecelakaan Grabwheels dalam Menjaga Citra Perusahaan. *Jurnal Communicator Sphere*, 1(1), 1-8.
- Zuama, A. P. C., Dinda, C. M., & Pamungkas, D. (2021). Telaah Regulasi Ojek Online di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Fenomenologi Hukum. *Jurnal Reformasi Hukum*, 25(1).